

BAB III

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pesta demokrasi yang dilaksanakan di desa Kanigoro, kecamatan Saptosari, Gunung Kidul pada tahun 2018, memiliki dinamika yang tersusun dalam rangkaian, tahapan dari proses pencalonan sampai pada hari pemilihan dan penetapan kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak, akan tetapi tahap awal dari penyelenggaraan pemilihan kepala desa adalah proses pembentukan panitia pilkades yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, dimana panitia pilkades dipilih oleh BPD berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Proses pembentukan panitia dilakukan secara demokrasi berdasarkan usulan dari masyarakat yang hadir pada saat rapat pembentukan panitia pilkades. Dalam hal ini panitia pemilihan kepala desa Kanigoro terdiri dari aparatur desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, beberapa tokoh masyarakat yang dinilai memenuhi kriteria yang sudah disepakati bersama.

Kemudian secara ringkasnya panitia pemilihan kepala desa melakukan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa dan melakukan penjurian berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan disepakati. Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan kemudian ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan. Tahap selanjutnya, calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat melalui sosialisasi, dan poster para calon.

Berdasarkan keputusan pemerintah desa Kanigoro yang memberikan wewenang kepada BPD untuk membentuk panitia pilkades yang berlandaskan

padaperaturan daerah Kabupaten Gunung Kidul nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa, dimana panitia pemilihan kepala desa di bagi sesuai posisi dan jabatan, yang akan mengerjakan tugas-tugas seperti:

1. Ketua panitia pemilihan, ketua panitia pilkades memiliki tugas untuk memberi perintah, mengarahkan, mengendalikan, mengorganisasikan agar proses pemilihan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu posisi ini bertindak mewakili seluruh panitia pemilihan dalam penyelenggaraan administrasi dan keuangan.
2. Panitia pemilihan yang menangani penatausahaan dan melayani secara administrasi semua posisi atau jabatan. Panitia ini bertugas menyediakan draf penyusunan regulasi dan pembuatan surat-surat dan dokumen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pilkades.
3. Panitia pemilihan yang menangani perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan, baik secara fisik maupun administrasi. Panitia ini bertugas untuk menerima, mengeluarkan, mengelola, dan melaksanakan penatausahaan keuangan serta menyusun pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
4. Panitia pemilihan yang menangani pendaftaran calon kepala desa. Panitia ini memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran bakal calon sampai dengan menyelenggarakan ujian bagi bakal calon kepala desa.
5. Panitia pemilihan yang menangani pendataan pemilih. Panitia ini bertugas melakukan pendataan penduduk dan pendaftaran pemilih bagi

penduduk yang memenuhi persyaratan, sampai dengan tugas penyusunan DPS dan DPT. Panitia ini dapat menunjuk petugas secara langsung sesuai kebutuhan, akan tetapi yang diutamakan adalah orang yang mengetahui dan memahami penduduk yang akan didaftar.

6. Panitia pemilihan yang menangani pemungutan suara. Panitia ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemungutan suara dan melaksanakan penghitungan suara. Karena tugas panitia ini sangat penting, maka perlu menunjuk petugas pemungutan suara antara sebagai berikut:

1. Petugas pintu masuk
2. Petugas bilik suara
3. Petugas penghitung suara
4. Petugas pengedali proses pemungutan suara
5. Petugas pintu keluar

7. Panitia pemilihan yang menangani logistik dan perlengkapan pilkades. Panitia ini memiliki tugas untuk menyediakan keperluan dan kebutuhan logistik pilkades, seperti surat suara, kotak suara, bilik suara dan lain-lain.

8. Panitia pemilihan yang menangani keamanan dan ketertiban pilkades. tugas panitia ini harus mengkoordinasikan keamanan karena beberapa tahapan pilkades sangat membutuhkan tenaga keamanan.

Untuk menggambarkan tingkat kewenangan masing-masing, maka panitia pemilihan harus memiliki struktur organisasi yang baik dan jelas. Struktur

organisasi yang baik hendak tidak terlalu besar dan melibatkan banyak orang dalam kepanitiaan, kemudian masing-masing jabatan dibuatkan uraian tugas kerja. Berikut contoh ilustrasi struktur organisasi panitia pemilihan kepala desa yang dapat disusun sebagai berikut:

1. Ketua
2. Wakil ketua
3. Sekertaris
4. Bendahara
5. Seksi pendaftaran calon
6. Seksi pendataan dan pendaftaran pemilu
7. Seksi pemungutan suara
8. Seksi logistik dan perlengkapan
9. Seksi keamanan

Panitia pemilihan kepala desa harus mempunyai upaya serta peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan pilkades, karena bagaimanapun kewajiban panitia pemilihan juga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat seperti halnya sosialisasi dan lain-lain. Panitia merupakan instrument penting dalam proses pemilihan kepala desa termasuk memberitahu kepada masyarakat tata cara pemilihan dan pendaftaran dan prosedur-prosedur pencalonan kepala desa.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Panitia Pilkades

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan panitia pilkades diperlukan mengingat masyarakat menjadi bagian penting dalam kehidupan di desa. Partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam membentuk panitia pilkades guna terwujudnya pesta demokrasi yang adil, jujur dan transparan. Desa sendiri diartikan sebagai masyarakat komunal yang penuh rasa gotong royong kebersamaan dan selalu menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah dan mufakat, dalam artian setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa harus melibatkan seluruh warganya, maka dari itu perlu dilibatkan masyarakat dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa.

Gambar 4 dan 5

Rapat pembentukan panitia pilkades





Sumber: pemerintah desa Kanigoro

Berikut wawancara dengan ketua panitia pikades mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan panitia pilkades:

“Dalam tahapan pembentukan panitia masyarakat ikut berpartisipasi, tapi perwakilan seperti tokoh masyarakat, pemerintah desa, karang taruna, pkk. Kalo mau menjadi panitia pilkades sebatas setau saya hanya minim SMP asalkan tidak terlibat menjadi tim sukses salah satu jago” (wawancara dengan ketua panitia bapak Sukidi 26 November 2019)

Berikut wawancara dengan tokoh masyarakat tentang syarat-syarat menjadi anggota panitia pilkades:

“Pertama adalah sebagai panitia pilkades adalah orang yang netralisasi, dia tidak istilahnya memegang salah satu calon dan juga dia harus berpedoman kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945 dan takwa kepada tuhan yang maha esa dan juga yang menjadi panitia adalah orang yang tidak mengikuti kegiatan politik dalam pencalonan pilkades tersebut, jadi dia benar-benar netralisasi tidak memihak sebelah, baik jago yang menjadi dukungannya ataupun tidak, dia harus benar-benar netralisasi” (wawancara dengan bapak Supardi 27 Desember 2019)

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan panitia pilkades jelas dilibatkan dengan mengundang dan mempertimbangkan masukan dan saran dari pihak yang berkompeten seperti: pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum yang ada di desa turut di ikut sertakan. Panitia pemilihan juga di ambil dari berbagai elemen masyarakat ada yang dari tokoh masyarakat, pemerintah desa, lembaga kemasyarakata dan masyarakat umum di desa artinya dalam proses pembentukan panitia pilkades menggunakan asas musyawara mufakat, serta disetiap rapat tidak diselesaikan oleh satu pikiran, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung dinamika politik desa.

Gambar 6 dan 7

Sosialisasi pilkades





Sumber: pemerintah desa Kanigoro

Berikut hasil wawancara dengan ketua panitia pilkades tentang sosialisasi yang dilakukan menjelang pilkades:

“Disetiap pedukuhanan nggak pasti ya, ada setiap dukuh itu satu, kemudian yang penduduknya banyak di sini, di mendak, di klumpit ada dua, jadi ada tiga dusun yang memiliki dua tps, sosialisasinya kalau kami datang di setiap pedukuhan, dengan pertemuan-pertemuan. Dengan sosialisasi kami mendorong untuk masyarakat agar menggunakan hak pilihnya”(wawancara dengan ketua panitia pilkades bapak Sukidi 26 November 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa panitia pilkades menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai panitia, termasuk bagian penting adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa kanigoro dimana panitia melakukan sosialisasi disetiap pedukuhan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, dalam artian panitia secara sistematis dan terstruktur fungsi dan tugas mereka sebagai panitia pemilihan kepala desa. Peryataan panitia di atas pun telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat

terkait pemahaman untuk menggunakan hak pilihnya dan ikut terlibat dalam proses berlangsung pemilihan pilkades sampai selesai acara.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Kampanye

Calon kepala desa yang sudah ditetapkan bisa dipilih dapat melakukan kampanye pada waktu yang ditentukan panitia pemilihan serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Proses kampanye tentunya dapat dikatakan sukses apabila seluruh komponen warga masyarakat ikut aktif untuk berpartisipasi pada saat kampanye. Kampanye yang dimaksud merupakan penyampaian visi dan misi dari para calon kades, yang akan dilaksanakan apabila mereka terpilih menjadi kepala desa. Dalam kampanye masing-masing calon kepala desa memiliki strategi dan taktik untuk mendapatkan suara terbanyak pada saat pemilihan kepala desa nantinya.

Di desa Kanigoro tidak diadakan kampanye berurutan antara satu calon ke calon lain akan tetapi seluruh calon melakukan kampanye terbuka dengan tema “Kampanye Dialogis” dalam artian kampanye yang dilakukan yaitu mengadakan dialog antara satu calon dan calon lainnya kemudian masyarakat boleh ikut bertanya terkait visi dan misi yang dipaparkan para calon, dari kampanye seperti inilah masyarakat dapat melihat pemimpin yang pantas untuk memimpin mereka selama 6 tahun masa jabatannya.

Gambar 8

Kampanye Dialogis



Sumber: pemerintah desa Kanigoro

Berikut partisipasi masyarakat desa Kanigoro dalam mengikuti kampanye pemilihan kepala desa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam menghadiri kampanye Pilkades

Partisipasi masyarakat desa Kanigoro dalam mengikuti kampanye pemilihan kepala desa diantaranya adalah menghadiri kampanye dialogis. Berdasarkan buku catatan perangkat desa pada hari selasa 09 Oktober 2018, jumlah masyarakat yang terdaftar hadir pada saat kampanye dialogis yaitu sebanyak 129 orang, dalam artian partisipasi masyarakat pada saat kampanye sudah cukup baik, karena pada saat kampanye masing-masing calon akan memaparkan visi dan misi, sehingga masyarakat bisa ikut mendengarkan dan

memastikan visi dan misi yang mana yang cocok untuk masa kepemimpinan selama 6 tahun kedepan. Berikut wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat sekaligus menjabat sebagai dukuh mengenai partisipasi masyarakat dalam menghadiri kampanye pilkades mengatakan:

“Kampanye itu ya memang yang dilaksanakan pertama adalah seorang jago kades harus bisa menampakan diri dengan satu sarat yaitu kampanye agar dia mengenalkan diri kepada warga masyarakat, di balai desa itu memang saya hadir karna ikut juga menyaksikan bahwasannya calon kepala desa itu waktu kampanye itu adalah penyampaian visi dan misi setelah dia menjadi atau terpilih menjadi kepala desa, saya sebagai seorang dukuh menyaksikan agar nantinya bilamana setelah menjadi kepala desa sudah terlantik, sudah di aktif dalam sebagai lurah desa, seandainya tidak melaksanakan visi misinya setelah dia kampanye, mungkin nanti bisa menghimbau dan himbau kepada masyarakat agar masyarakat menuntut kepada lurah yang terpilih tersebut” (wawancara dengan bapak Supar 27 Desember 2019)

Berikut wawancara dengan masyarakat mengenai kehadiran saat kampanye:

“Iya hadir, karna saya juga kan kepala rumah tangga (RT) jadi di undang di desa, iyah saya mengajak apa itu tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir di sana, karna ada undangan RT harus datang melihat visi misi kepala calon kepala desa”(wawancara dengan bapak Warjito 27 Desember 2019)

Berikut wawancara dengan salah satu perangkat desa mengenai ajakan seluruh warga masyarakat untuk menghadiri kampanye:

“Iya sebenarnya saya mengajak tapi warga masyarakat mungkin dengan belum tau apa arti kampanye sehingga ada yang tidak mengikuti, tapi dengan sarat saya mengajak kepada warga masyarakat marilah kita gunakan hak pilih, marilah kita ketahui visi dan misi calon kepala desa agar kita bisa menggunakan hak pilih dan partisipasi kita sebagai warga masyarakat yang baik” (wawancara dengan bapak Sugiyanto 26 November 2019)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kanigoro dalam menghadiri kampanye pilkades cukup baik. Dilihat juga dari jumlah kehadiran masyarakat pada saat kampanye berlangsung yaitu 129 orang. Hal itu juga dilakukan dengan mengajak warga masyarakat lain untuk menghadiri kampanye, untuk mengenal para calon dan khususnya mengetahui visi misi masing-masing calon jika mereka terpilih.

2. Partisipasi dalam mengajak teman untuk menghadiri kampanye.

Partisipasi masyarakat desa Kanigoro pada saat mengikuti kampanye pilkades diantaranya adalah dengan mengajak teman untuk menghadiri kampanye pilkades, dimana seorang masyarakat desa menuturkan:

“Iya saya hadir terus, kampanye perlu di adakan toh mas, ya untuk memperkenalkan, kampanye itu untuk memperkenalkan calon kepala desa, kampanye juga mempengaruhi pilihan toh mas, saya mengajak teman kalo yang mau ya hadir kalo nggak mau ya ndak hadir” (wawancara dengan bapak Marjiranto 27 Desember 2019)

Hal yang sama diucapkan juga oleh ketua karang taruna mengenai partisipasi dan mengajak teman untuk ikut menghadiri kampanye:

“Iya saya menghadiri kampanye, dan kampanye sangat mempengaruhi pilihan. Saya mengajak teman-teman karang taruna juga untuk datang pada waktu kampanye” (wawancara dengan ketua karang taruna mas Dwiyanto 27 Desember 2019)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di desa Kanigoro dalam mengajak teman untuk menghadiri kampanye pemilihan kepala desa cukup baik. Ajakan untuk menghadiri kampanye juga disertai upaya untuk meyakinkan teman bahwa apa yang disampaikan para calon kepala desa pada saat kampanye dapat membantu masyarakat untuk menentukan pilihan calon kepala desa yang tepat.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemungutan Suara

Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kalangan pemerintahan memberikan peluang bagi warga masyarakat untuk menentukan pilihannya secara langsung. Pemilihan kepala desa merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih kepala pemerintah tingkat desa atau kepala desa yang nantinya dipercaya untuk mengelola kinerja aparatur pemerintahan di tingkat desa. Oleh karena itu, masyarakat harus berpartisipasi dalam kegiatan pencoblosan. Berikut partisipasi masyarakat desa kanigoro dalam pencoblosan pilkades:

1. Kehadiran dalam kegiatan pemungutan suara pilkades

Penyelenggara pilkades merupakan sebuah pesta demokrasi bagi masyarakat desa, karena masyarakat desa dapat berpartisipasi secara langsung dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat memajukan potensi desa tersebut. Berkaitan dengan itu maka masyarakat harus menghadiri kegiatan pemungutan suara pemilihan kepala desa. Jumlah penduduk desa Kanigoro yaitu sebanyak 6,769 jiwa, akan tetapi yang terdaftar dalam data DPT untuk mengikuti pemilihan kepala desa tahun 2018 sebanyak 5,309, sementara yang datang menggunakan hak suaranya sebanyak 4,501, sedangkan jumlah pemilih yang tidak hadir memberikan hak suara sebanyak 807 orang.

Gambar 9 dan 10

Proses pemungutan suara pilkades





Sumber: pemerintah desa Kanigoro

Terkait dengan kehadiran dalam kegiatan pemungutan suara pilkades tersebut, seorang perangkat desa menuturkan:

“Saya pribadi memang saya menyumbangkan suara saya untuk memilih kepala desa dikarenakan sebagai warga Negara yang baik, warga yang berpancasila, warga yang bagus adalah jangan sampai golput, kita harus menggunakan hak pilih untuk memilih seorang pemimpin yang lebih baik” (wawancara dengan bapak Supar 27 Desember 2019)

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh seorang pemuda mengenai partisipasi dalam pemungutan suara:

“Saya hadir, kan sebagai warga Negara yang baik itu harus memilih pemimpin yang baik melalui pemilihan kepala desa, lagi pula pemilihan kepala desa ini kan 5 tahun sekali, sehingga kami sangat antusias ketika memberikan hak suara” (wawancara dengan pemuda mas Endar 27 Desember 2019)

Gambar 11 dan 12

Partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara



Sumber: Pemerintah desa Kanigoro

Kemudian disampaikan juga oleh perangkat desa:

“Iya hadir, pertimbangannya itu ya memilih kepala desa supaya desa atau desa kanigoro bisa maju dan berdaya saing, jadi kepala desa baru visi, visi misinya bisa membawa desa maju, biar nanti desa kanigoro bisa lebih baik lagi dari pada yang sebelumnya” (wawancara dengan bapak Sarjito 27 Desember 2019)

Hal serupa diungkapkan juga oleh seorang masyarakat:

“Saya ikut memberikan hak suara, yang jelas program-program pake calon-calon kepala desa itu yang terbaik, biasanya saya dan keluarga datang bareng-bareng sama

keluarga dalam acara pemungutan suara” (wawancara dengan bapak Yanto 27 Desember 2019)

Berikut wawancara dengan perangkat desa mengenai masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pilkades:

“Terutama menyangkut partisipasi masyarakat ada beberapa masyarakat yang memang di luar kota sehingga jadi tidak bisa mengikuti untuk partisipasinya itu yang jelas, tapi secara umumnya panitia itu memang yang paling urgent itu kan karna pilkades itu kan pemilu yang secara menurut saya pemilu yang paling panas, pemilu yang paling panas itu memang ada di pilkades karna antar gesekan di masyarakat itu jelas, jelas opo yo lebih terasa dari pada dengan pilihan legislatif, dan pemilu lainya karna tidak ada yang kenal, meskipun tau tapi tidak sedekat calon kepala desa” (wawancara dengan bapak Sugeng riyanto 26 November 2019).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa kehadiran masyarakat di desa Kanigoro dalam kegiatan pemungutan suara pilkades cukup baik dibuktikan dengan data rekapitulasi suara pilkades, dimana jumlah pemilih yang memberikan hak suara sebanyak 4,501. Mereka memiliki kesadaran dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala desa karena mereka juga sadar bahwa dengan hadir memberika suara di bilik suara mereka telah berkontribusi membangun desa Kanigoro dengan cara lewat dunia demokrasi yaitu pilkades. Masyarakat juga mengatakan bahwa mereka lebih atusias dalam pemilihan kepala

desadibandingkan pesta demokrasi lain seperti di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional karena mereka bisa merasakan langsung siapa pemimpin mereka dan juga arah kebijakan untuk desa mereka kedepannya, salah satu cara adalah dengan ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Perhitungan Suara

Partisipasi masyarakat dalam penghitungan suara pilkades perlu dilakukan oleh masyarakat desa agar masyarakat bisa menyaksikan secara langsung perhitungan suara dan sekaligus meminilisir adanya kecurangan pada saat penghitungan suara berlangsung. Sehingga masyarakat tidak saling mencurigai antar kelompok pendukung masing-masing calon kepala desa, maka dari itu sangat penting bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau menghadiri secara langsung perhitungan suara. Dengan demikian masyarakat juga bisa menyaksikan secara langsung peraih suara terbanyak atau pemenang dalam kompetisi demokrasi di tingkat lokal ini. Berdasarkan surat berita acara hasil pilkades desa Kanigoro, perolehan jumlah suara terbanyak pada saat perhitungan suara didapatkan oleh calon nomor urut 4 yaitu bapak Suroso sebanyak 2,783 (61,8%), sementara calon no urut 1 sebanyak 802 (17,8%), nomor urut 2 sebanyak 292 (6,4%) dan nomor urut 3 sebanyak 624 (13,8%) dari total suara sah sebanyak 4,501.

Gambar 13

Penyerahan surat berita acara hasil pilkades



Sumber: pemerintah desa Kanigoro

Lebih lanjutnya partisipasi dalam perhitungan suara pemilihan kepala desa di desa Kanigoro dapat uraikan sebagai berikut:

1. Kehadiran dalam penghitungan suara pilkades

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dapat dilakukan dengan banyak cara diantaranya adalah mengadiri kegiatan perhitungan suara. Hampir seluruh warga masyarakat desa Kanigoro ikut menggawal jalannya perhitungan suara, hal itu semata-mata dilakukan agar tidak terjadinya kecurangan, konflik serta untuk mengetahui siapa pemenang dalam pilkades.

Gambar 14 dan 15

Proses perhitungan suara per dusun



Sumber: pemerintah desa Kanigoro

Terkait dengan kehadiran dalam perhitungan suara pemilihan kepala desa, seorang tokoh masyarakat menuturkan:

“Iya waktu itu saya sebagai kpps, anggota kpps di desa, dan saya juga mengawal waktu pemungutan bahkan sampai perhitungan untuk mengawal di setiap tps itu adalah tugas saya sebagai kpps desa” (wawancara dengan bapak Supar 27 Desember 2019)

Selanjutnya, ketua karang taruna mengatakan:

“Iya saya terlibat pada saat perhitungan suara, pada saat itu saya sebagai saksi juga sebagai penulis itu jumlah-jumlah suara yang di dapat dari masing-masing calon” (wawancara dengan ketua karang taruna mas wiyanto 27 Desember 2019)

Jawaban yang sama disampaikan oleh salah satu masyarakat sebagai berikut:

“Pada saat perhitungan suara saya hadir untuk menyaksikan jalan perhitungan, saya mendukung apapun hasil perhitungan suaranya karena saya yakin prosesnya sudah berjalan dengan baik dan juga kita hadir untuk mengawasi juga jalannya acara, jangan sampai adanya kecurangan” (wawancara dengan bapak Yanto 27 Desember 2019)

Berikut wawancara dengan perangkat desa:

“Dalam acara perhitungan surat suara saya hadir, ya sekalian meramaikan acara perhitungan suara dan sekaligus juga ngumpul dengan masyarakat karna banyak masyarakat yang menyaksikan sekaligus kita awasi bersama jalannya acara pilkades ini (wawancara dengan bapak Sugeng Riyanto 26 November 2019)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perhitungan suara di desa Kanigoro sangat baik di buktikan dengan antusias masyarakat untuk hadir pada saat pelaksanaan perhitungan suara guna menghindari terjadinya kecurangan dalam proses perhitungan suara. Dalam artian

masyarakat desa kanigoro sudah sadar bahwasanya mengikuti perhitungan suara dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan, dan juga masyarakat dapat merasakan langsung dinamika-dinamika politik yang terjadi di desa. Hanya saja ada beberapa masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi pada saat perhitungan suara lantaran sedang berada di luar kota untuk berkerja.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa.

Dalam partisipasi warga masyarakat tentunya memiliki faktor pendorong yang melandasi sehingga mereka mau hadir dan memberikan hak suara pada saat pemilihan kepala desa. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Kanigoro sehingga memberikan hak suara pada saat pemilihan kepala desa:

1. Kesadaran politik. Yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, baik itu hak politik untuk memilih pemimpin, hak ekonomi, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban dalam segala urusan politik. Dalam konteks pemilihan kepala desa individu-individu tentunya memiliki alasan yang menjadi landasan kenapa mereka mau berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, salah satunya adalah kesadaran akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Berikut

wawancara dengan tokoh masyarakat tentang faktor yang melatarbelakangi partisipasi politiknya:

“Iya memang saya berkomitmen sekali karena kan di wilayah harus ada seorang pemimpin dan seorang pemimpin harus benar-benar di pilih dari warga masyarakat agar nantinya bisa memajukan kepada lingkungan tersebut atau wilayah tersebut dengan syarat kita harus mengabdikan kepada Negara, mengabdikan kepada pemerintah itulah masyarakat yang baik, yang pancasila sehingga menggunakan hak pilihnya” (wawancara dengan bapak Supar 27 Desember 2019)

Kemudian salah satu perangkat desa menjelaskan faktor yang mendorongnya ikut berpartisipasi sebagai berikut:

“Jelas demi kemajuan desa kanigoro yang menjadi faktor kenapa saya berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, dan sebagai warga masyarakat yang baik kita juga harus mau untuk berpartisipasi demi kemajuan desa” (wawancara dengan bapak Sugiyanto 26 November 2019)

Hal yang sama juga di ucapkan oleh salah satu masyarakat:

“Itu karena dari pertama itu dari visi dan misinya iya toh, yang kedua karena di daerah di kelurahan kanigoro ini untuk calon yang paling mempunyai apa ya karakter sebagai pemimpin yang baik itu sudah kelihatan jadi saya ya itu berpartisipasi” (wawancara dengan bapak Supardi 27 Desember 2019)

2. Faktor individu kekeluargaan. Yang dimaksud dengan faktor individu ini adalah adanya hubungan kekeluargaan antara calon kepala desa dengan pemilih. Seperti yang sudah di paparkan di atas bahwa setiap individu memiliki alasan untuk berpartisipasi, jadi tidak hanya faktor kesadaran politik yang melatar belakangnya akan tetapi faktor

kekeluargaan juga menjadi hal yang tidak terlepas dalam politik lokal, seperti yang di ucapkan pemuda saat dilakukan wawancara mendalam tentang faktor yang melatarbelakanginya untuk ikut berpartisipasi sebagai berikut:

“Kan kemarin saat pemilihan kepala desa ada calon yang memiliki ikatan darah dengan keluarga saya, jadi saya sengaja memilih calon yang itu, karna faktor keterikatan saudara sekaligus mendengarkan visi dan misinya yang lumayan menurut saya, tapi yang lebih utama karna adanya keterikatan saudara sih mas” (wawancara dengan ketua karang taruna mas Dwiyanto 27 Desember 2019)

Berikut wawancara dengan seorang masyarakat:

“Kemarin karena ada keluarga juga yang ikut mas, jadi saya dan keluarga memilihnya, dan visi misinya menurut saya bagus dari pada calon-calon yang lain” (wawancara dengan bapak Yanto 27 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Kanigoro terdapat dua yaitu kesadaran politik dan faktor individu kekeluargaan, dimana dari beberapa informan menjelaskan bahwa faktor mereka berpartisipasi dalam pilkades desa Kanigoro yaitu karena adanya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, akan tetapi ada juga informan yang mengatakan bahwa faktor yang melatar belakanginya berpartisipasi yaitu adanya hubungan kekeluargaan, akan tetapi dari seluruh informan tersebut mengharapkan dengan diberikannya hak

pilih mereka dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di wilayah terkecil ini atau pilkades, diharapkan mampu membawa perubahan desa kearah yang lebih baik lagi.

Dari hasil pengamatan dan wawancara berbagai sumber seperti, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Kanigoro berjalan cukup baik dan hampir semua proses pilkades masyarakat ikut aktif, dan jika dibandingkan dengan pemilihan kepala desa di tahun sebelumnya sangat jauh berbeda tingkat partisipasinya, di tahun 2018 tingkat partisipasi warga masyarakat sangat tinggi yaitu 80% dibuktikan dengan surat berita acara hasil pilkades, dimana jumlah kehadiran dalam memberikan hak suara sebanyak 4.501 dari jumlah DPT sebanyak 5,309 orang, dalam hal ini yang tidak datang memberikan hak suaranya sebanyak 807 orang. Beberapa masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi lantaran sedang berada di luar kota untuk berkerja, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa kanigoro. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Kanigoro tahun 2018 sangat tinggi.